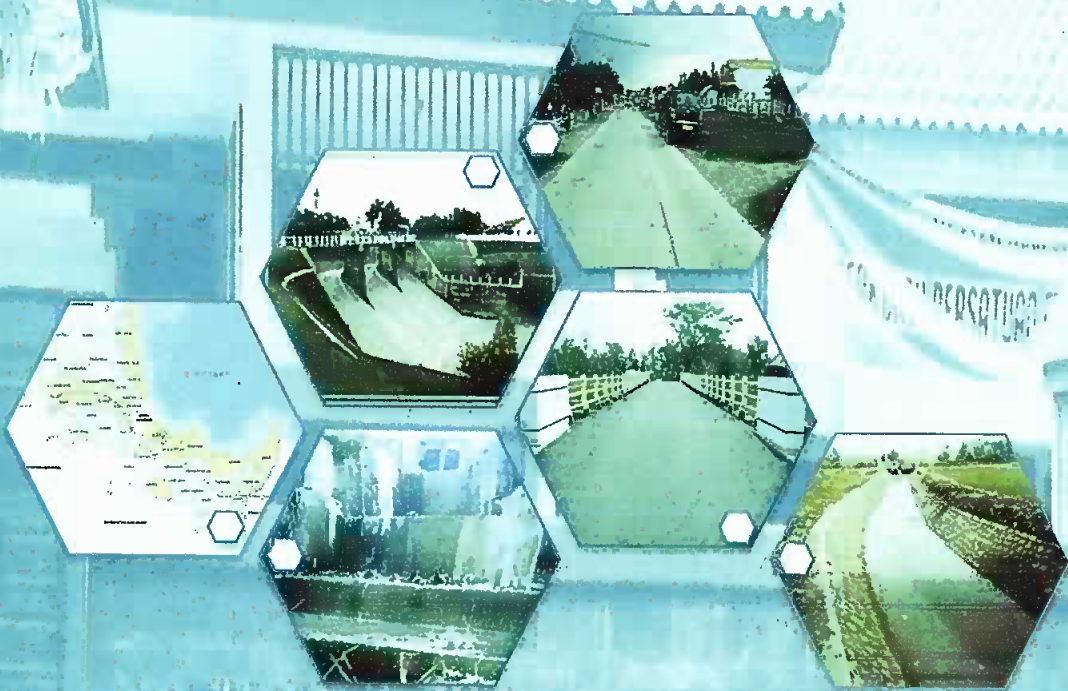


# *RENCANA STRATEGIS*

## **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **KABUPATEN CIREBON**

#### **TAHUN 2019 - 2024**



**KAB. CIREBON**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**2019**

## ***Kata Pengantar***

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 11 ayat 1 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana perangkat daerah salah satunya Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode 5 (lima) tahun, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel .

Dengan diselesaikannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka acuan penyelenggaraan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun kedepan diharapkan dapat dicapai dan dapat mengakomodasi tuntutan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai akhir Tahun 2024. Demikian juga Sasaran dan Target yang telah ditetapkan telah berbasis kinerja yang berorientasi pada manfaat yang akan diperoleh.

Kami mengharapkan agar jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dapat secara konsekuen melaksanakan

seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , sebagaimana tertuang pada Renstra ini, dapat dicapai guna memenuhi amanat RPJMD sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan Infrastruktur kepada masyarakat.

Sumber, 2019  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang  
Kabupaten Cirebon



**Ir. AVIP SUHERDIAN, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640827 199303 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .....	II.1
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II.1
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II.4
2.3. Aset yang Dikelola .....	II.6
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II.12
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II.21
 BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	III.1
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program RPJMD .....	III.3
3.3. Telahaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum .....	III.5
3.4. Telahaan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air .....	III.7
3.5. Telahaan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga .....	III.9
3.6. Telahaan Renstra Dinas Bina Marga, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat .....	III.10
3.7. Telahaan Rencana Tata Ruang .....	III.13
3.8. Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III.17
3.9. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III.18
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV.1
4.1. Tujuan .....	IV.1
4.2. Sasaran .....	IV.1
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V.1
5.1. Strategi dan Kebijakan .....	V.1
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	VI.1
6.1. Rencanan Program dan Kegiatan .....	VI.1
6.2. Indikator Kinerja .....	VI.5

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VII.1
7.1. Indikator Kinerja .....	VII.1
7.2. Indikator Kinerja Utama .....	VII.7
BAB VIII PENUTUP .....	VIII.1

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
2.1.	Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	II.4
2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan .....	II.5
2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	II.5
2.4.	Jumlah Jabatan Struktural dan Perjenjangan .....	II.5
2.5.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	II.5
2.6.	Aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan yang dikelola .....	II.6
2.7.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Perkerasan .....	II.13
2.8.	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi .....	II.14
2.9.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan .....	II.15
2.10	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan .....	II.15
2.11	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Periodik/Berkala/Rutin .....	II.15
2.12	Kondisi Saluran Irigasi Primer .....	II.16
2.13	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder .....	II.16
TC-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II.17
TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon .....	II.18
TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon .....	II.19
TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon .....	II.20
T-B 35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	III.2
3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah .....	III.4

No.	Judul Tabel	Hal
3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III.7
3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III.8
3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III.9
3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III.11
3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III.12
3.7	Rencana Sistem Perkotaan .....	III.14
3.8	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III.15
3.9	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Telaahan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III.17
4.1	Rancangan Indikator Kinerja Tujuan .....	IV.1
4.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon .....	IV.3
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V.1
6.1	Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	VI.6
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	VII.3

No.	Judul Tabel	Hal
7.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	VII.4
7.3	Indikator Kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD .....	VII.7
7.4	Indikator Kinerja Utama .....	VII.8



## DAFTAR GRAFIK

No.	Judul Tabel	Hal
2.1.	Panjang Jalan Menurut Perkerasan .....	II.13
2.2.	Panjang Jalan Menurut Kondisi .....	II.14
2.3.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan .....	II.15
2.4.	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan .....	II.15
2.5.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Periodik/Berkala/Rutin .....	II.15
2.6.	Kondisi Saluran Irigasi Primer .....	II.16
2.7.	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder .....	II.16

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal
2.1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II.3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat tentang klasifikasi urusan pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintah Daerah yakni urusan kokuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penggabungan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, Dinas Bina Marga dan salah satu Bidang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu Bidang Tata Ruang yang terbentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sub urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan di dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dalam mendukung kualitas pelayanan dibidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang dengan sub urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang kepada masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan yang optimal serta terarah maka diperlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019 – 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dibuat sebagai bahan acuan dan rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon selama kurun waktu lima tahun 2019 – 2024, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan dan Program

Pembangunan Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang melalui Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum (azas legalitas), sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang – undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
8. Undang – undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang – undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
18. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 224 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Momor 24, Seri E 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2018-2038.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Cirebon agar mencapai hasil yang optimal dan konsisten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian kepada hasil dan manfaat.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024;
- b. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 2020 - 2024.
- c. Menyediakan dasar dalam penetapan, pengendalian dan penyusunan Laporan yang Akuntabel Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 disusun dengan sistematikas sebagai berikut :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sitematika Penulisan

##### **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

##### **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah
- 3.3. Telahaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3.4. Telahaan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang serta Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
- 3.5. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Cirebon
- 3.6. Penentuan isu-isu strategis



BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

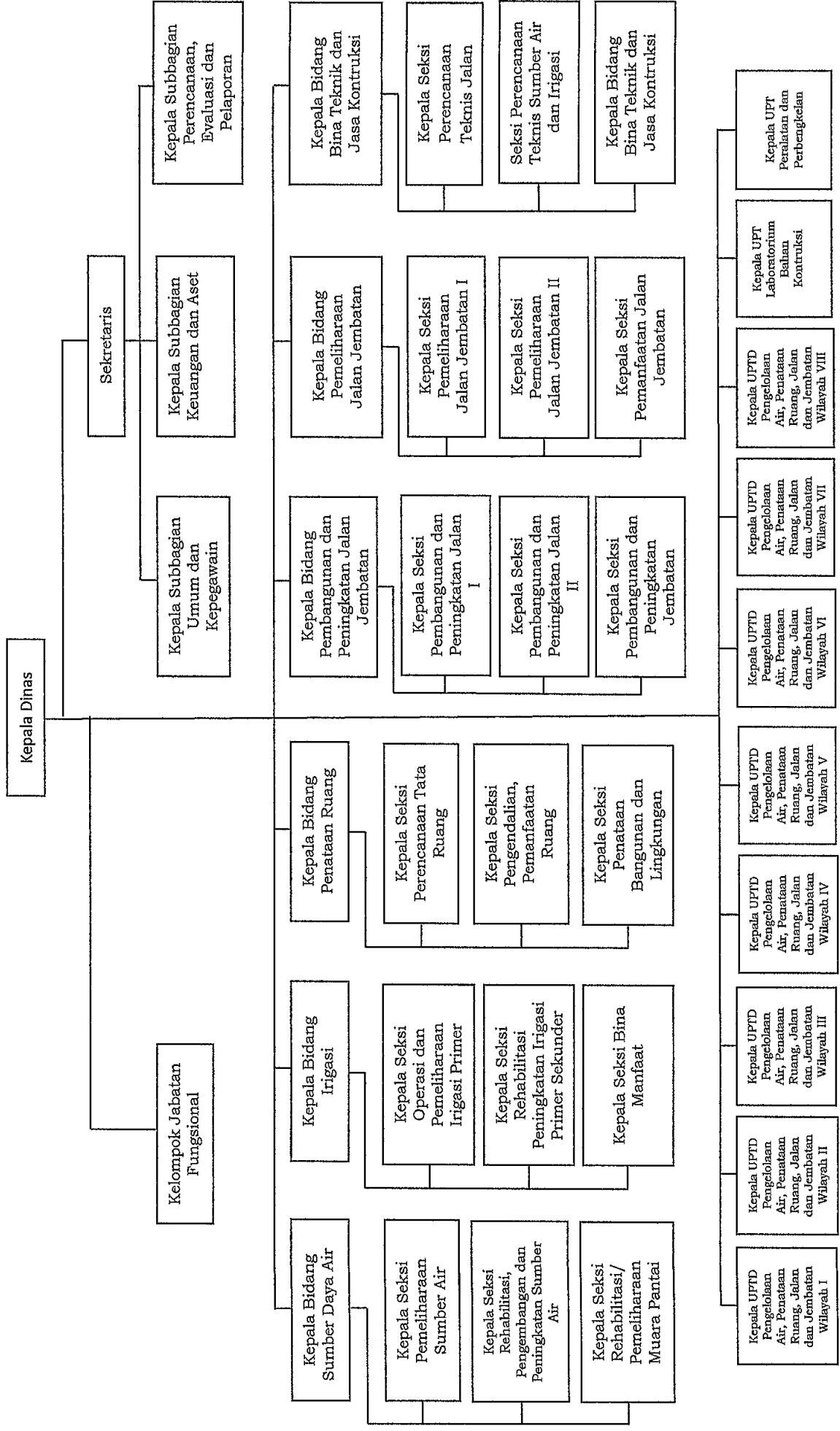
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, adalah :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan dan Aset, Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi Seksi Pemeliharaan Sumber Air, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air, Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Muara Pantai;
- d. Bidang Irigasi, yang membawahi Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder, Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder, Seksi Bina Manfaat;

- e. Bidang Penataan Ruang, yang membawahi Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- f. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan, yang membawahi Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
- g. Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan, yang membawahi Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I, Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II, Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan;
- h. UPT Meliputi :
  - 1. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I;
  - 2. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - 3. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III;
  - 4. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
  - 5. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V;
  - 6. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
  - 7. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII
  - 8. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII;
  - 9. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - 10. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi.

Gambar 2.1.  
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2018 meliputi tenaga PNS dan Non PNS, untuk PNS berjumlah 240 Orang dan Non PNS berjumlah 301 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, dan Pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2. , Tabel 2.3., dan 2.4.

Tabel 2.1.  
Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Unit Kerja	PNS			Non PNS
		Teknik	Non Teknik	Jumlah	
1	Dinas PUPR	34	46	80	104
2	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I	-	21	21	21
3	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II	-	26	26	22
4	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III	-	17	17	24
5	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV	3	10	13	13
6	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V	-	19	19	27
7	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI	1	12	13	35
8	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII	1	14	15	12
9	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII	-	13	13	16
10	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	2	14	16	18
11	UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi	3	4	7	9
<b>Jumlah =</b>		<b>44</b>	<b>196</b>	<b>240</b>	<b>301</b>

Tabel 2.2.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Gol.	Jumlah SDM (orang)				Jumlah
	a	B	c	d	
IV	5	-	1	-	6
III	16	48	12	27	103
II	11	40	51	4	106
I	-	-	24	1	25
JUMLAH					240

Tabel 2.3.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Gol.	Jumlah Pegawai dengan Pendidikan (Orang)					
	S2	S1	DIP	SMA	SMP	SD
IV	3	3	-	-	-	-
III	1	79	1	22	-	-
II	-	-	-	88	10	8
I	-	-	-	-	5	20
Jumlah	4	82	1	110	15	28

Tabel : 2.4.  
Jumlah Jabatan Struktural dan Perjenjangan

Eselonering (Orang)		Penjenjangan (Orang)	
Eselon II b	1	Pimp. II	1
Eselon III a	-	Pimp. III	3
Eselon III b	6	Pimp. IV	34
Eselon IV a	31		
JUMLAH	38	JUMLAH	38

Tabel 2.5.  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	
Pasca Sarjana (S2)	3
Sarjana (S1)	82
Sarjana Muda (D3)	1
SLTA	110
SLTP	15
SD	28
<b>Jumlah</b>	<b>240</b>

Berdasarkan data yang diperoleh dari jenjang Pendidikan terlihat masih kurangnya tenaga teknis dibandingkan dengan tenaga umum.

### 2.3 Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon per 1 Januari 2017 berdasarkan Kartu Inventaris Barang, berupa Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Air dengan rincian jenis aset dapat dilihat pada tabel 2.6. Sisanya adalah aset tetap lainnya.

Tabel 2.6.  
Aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor	Unit	58
2	Tanah	m <sup>2</sup>	6.109.238,38
3	Alat Berat	Unit	68
4	Alat Bengkel	Unit/Buah	70
5	Kendaraan (Roda 10, 6, 4, 3 dan 2)	Unit	153
6	Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tanggga	Unit/Buah	3.364
7	Alat Laboratorium	Unit	303

### 2.4. Jalan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan ada Pasal 9 Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa.

Yang dimaksud Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan

strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat

kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem Jaringan Jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, berdasarkan status jalan jalan adalah :

1. Jaringan Jalan Kabupaten : 564 Ruas, sepanjang 1.240,30 Km (Kep. Bupati No. 620/Kep. 545-BM/2016) Kewenangan pembinaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## 2.5 Air Permukaan

### 2.5.1 Sungai

Kabupaten Cirebon berada di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk dan Wilayah Sungai Cisanggarung, dengan enam belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, DAS Cimanis dan DAS Jatiroke.

Pembagian pengelolaan kewenangan Daerah Irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dimana terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, data per tahun 2018 seluas ± 32.384 Ha meliputi :
  1. DI Rentang seluas ± 20.620 Ha;
  2. DI Ciwaringin seluas ±1.103 Ha;
  3. DI Seuseupan seluas ± 3.897 Ha dan



4. DI Cikeusik seluas ± 6.924 Ha.

b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas ± 8.765 Ha meliputi :

1. DI Walahar seluas ±1.286 Ha;
2. DI Jamblang seluas ± 2.141 Ha;
3. DI Cipager seluas ± 855 Ha;
4. DI Setupatok seluas ±1.365 Ha;
5. DI Paniis Lebak seluas ± 318 Ha;
6. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
7. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
8. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
9. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
10. DI Katiga seluas ± 662 Ha;
11. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha dan
12. DI Cirongkob seluas ± 64 Ha.

c. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/Kep.31-PUPR/2017 seluas ± 10.267 Ha meliputi :

1. DI Jatisawit ± 687 Ha
2. DI Telagaremis ± 90 Ha
3. DI Tonjong ± 107 Ha
4. DI Sigong ± 99 Ha
5. DI Ciliwotan ± 64 Ha
6. DI Ciwedus ± 159 Ha
7. DI Sigebang ± 167 Ha
8. DI Cibuang ± 23 Ha
9. DI Sawa Banjar ± 6 Ha
10. DI Pilang ± 15 Ha
11. DI Plered/Kletet ± 12 Ha
12. DI Suminta ± 19 Ha
13. DI Gunungbreg ± 8 Ha
14. DI Dukusuwung ± 93 Ha
15. DI Cileksa ± 35 Ha
16. DI Cimanggung ± 15 Ha
17. DI Ciasem ± 37 Ha
18. DI Cileungsi ± 35 Ha
19. DI Soka ± 285 Ha
20. DI Cigobang ± 173 Ha

21.	DI Rajadana	± 135 Ha
22.	DI Ciparigi	± 438 Ha
23.	DI Keputon	± 399 Ha
24.	DI Soka Udik	± 152 Ha
25.	DI Situam I	± 150 Ha
26.	DI Situam II	± 158 Ha
27.	DI Cibuluh	± 248 Ha
28.	DI Cirengas	± 237 Ha
29.	DI Suba	± 218 Ha
30.	DI Dalem	± 96 Ha
31.	DI Loak Udang	± 113 Ha
32.	DI Kenanga	± 51 Ha
33.	DI Gedongan	± 15 Ha
34.	DI Citelang I	± 9 Ha
35.	DI Citelang II	± 4 Ha
36.	DI Cigembor	± 16 Ha
37.	DI Loa	± 24 Ha
38.	DI Tegal	± 64 Ha
39.	DI Harikukun	± 23 Ha
40.	DI Jengkol	± 27 Ha
41.	DI Mandalangit	± 46 Ha
42.	DI Tegal Pucuk	± 36 Ha
43.	DI Balong	± 76 Ha
44.	DI Ranca Tunggal	± 10 Ha
45.	DI Gronggong	± 42 Ha
46.	DI Karoya	± 7 Ha
47.	DI Umbar	± 6 Ha
48.	DI Cidahu	± 5 Ha
49.	DI Patapan	± 41 Ha
50.	DI Cicurug	± 4 Ha
51.	DI Citalang II	± 4 Ha
52.	DI Talang	± 2 Ha
53.	DI Lamping	± 2 Ha
54.	DI Cibatok	± 2 Ha
55.	DI Citeureup	± 2 Ha
56.	DI Tamiang	± 2 Ha
57.	DI Cidamar	± 4 Ha
58.	DI Cibiliuk	± 3 Ha
59.	DI Jagong	± 2 Ha
60.	DI Cigambir	± 2 Ha
61.	DI Cisamaya	± 63 Ha
62.	DI Pogor	± 37 Ha
63.	DI Cigolempang	± 40 Ha

64.	DI Cisoka	±	87 Ha
65.	DI W. Sedong	±	169 Ha
66.	DI Agung	±	711 Ha
67.	DI Kecepat	±	477 Ha
68.	DI Panongan	±	952 Ha
69.	DI Ciwado	±	829 Ha
70.	DI Ciawi	±	378 Ha
71.	DI Plester	±	72 Ha
72.	DI Cimanis	±	261 Ha
73.	DI Ketos	±	363 Ha
74.	DI Sendi	±	23 Ha
75.	DI Leuwi	±	3 Ha
76.	DI Pabrik	±	1 Ha
77.	DI Cangkuang	±	806 Ha

Selain dari Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di atas terdapat juga Daerah Irigasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

#### 2.5.2 Waduk (Situ dan Embung)

Kabupaten Cirebon terdapat waduk sedang dan kecil, dimana waduk sedang meliputi Situ Patok di Desa Penpen Kecamatan Mundu, luas ±175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±13.790.000 m<sup>3</sup>, dan Situ Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ±19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±1.850.000 m<sup>3</sup>, selain waduk sedang, Kabupaten Cirebon juga terdapat 8 (delapan) embung yang terdiri dari :

1. Embung Geyongan luas permukaan ± 0,045 km<sup>2</sup>, perkiraan daya tampung 0,135 m<sup>3</sup>;
2. Embung Rajadana luas permukaan ± 0,082 km<sup>2</sup>, perkiraan daya tampung 18,630 m<sup>3</sup>;
3. Embung Danamulya luas permukaan ± 0,010 km<sup>2</sup>, perkiraan daya tampung 2.400 m<sup>3</sup>
4. Embung Sarwadadi luas permukaan ± 0,050 km<sup>2</sup>, perkiraan daya tampung 47.700 m<sup>3</sup>;
5. Embung Kalideres luas permukaan ± 0,0159 km<sup>2</sup>, perkiraan daya tampung 15.900 m<sup>3</sup>;

6. Embung Wanakaya luas permukaan  $\pm 0,0189 \text{ km}^2$ , perkiraan daya tampung  $18.900 \text{ m}^3$
7. Embung Slendra luas permukaan  $\pm 0,0219 \text{ km}^2$ , perkiraan daya tampung  $35,040 \text{ m}^3$  dan
8. Embung Suranenggala
9. Embung Kaliwedi
10. Embung Cupang
11. Embung Galagamba
12. Embung Sitebok

### 2.5.3 Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Cirebon terdapat wilayah rawan bencana alam tanah longsor, Gelombang Pasang, banjir, dan kukarangan air/kekeringan. Adapun rincian daerah rawan bencana sebagai berikut:

- (1) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 4.583 (empat ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
  - Desa Halimpu dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber;
  - Desa Cisaat, Desa Cipanas, Desa Girinata, Desa Bobos, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan;
  - Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged;
  - Desa Karangwuni, Desa Windujaya dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong;
  - Desa Sidawangi dan Desa Matangaji Kecamatan Sumber; dan
  - Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang seluas kurang lebih 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:
  - Kecamatan Losari;
  - Kecamatan Gebang;
  - Kecamatan Pangenan;
  - Kecamatan Astanajapura;
  - Kecamatan Mundu;

- Kecamatan Gunungjati;
- Kecamatan Suranenggala; dan
- Kecamatan Kapetakan.

(3) Kawasan rawan banjir kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar, meliputi :

- Desa Karangkendal dan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
- Desa Wanakaya dan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
- Desa Tawang Sari dan Desa Ambulu Kecamatan Losari;
- Desa Jagapura Kulon, Desa Jagapura Kidul, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
- Desa Babakan dan Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
- Desa Ciuyah, Desa Ambit, Desa Gunungsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Waled;
- Desa Girinata, Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan;
- Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu.

Sumber Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019.

## **2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon**

### **2.4.1 Kondisi Infrastruktur**

#### **A. Jalan**

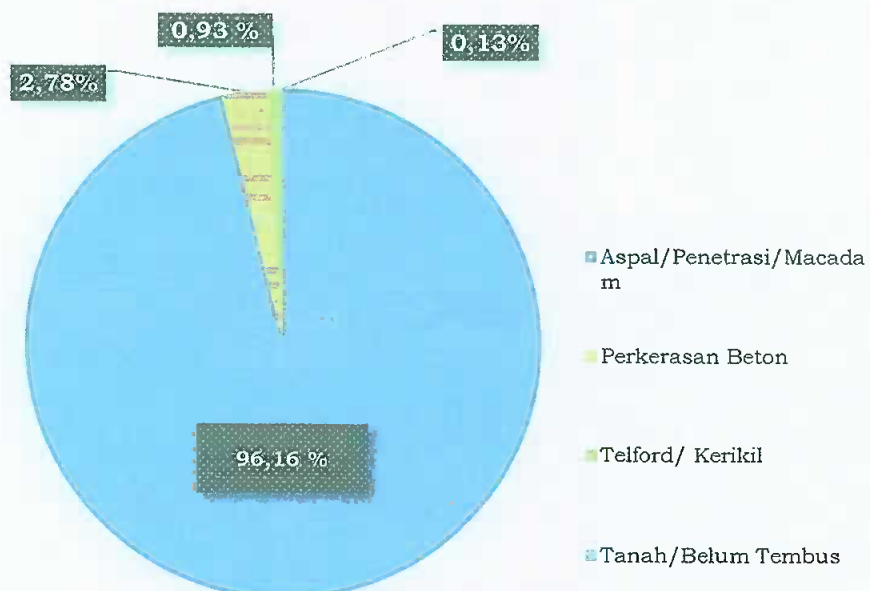
Panjang Jalan Kabupaten Cirebon tiap jenis permukaan Tahun 2018 secara umum telah beraspal, dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.7  
 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Perkerasan Tahun 2018

Jenis Perkerasan	Jalan Kabupaten	
	Km	%
Aspal/Penetrasi/Macadam	1.192,62	96,16
Perkerasan Beton	34,53	2,78
Telford/ Kerikil	11,52	0,93
Tanah/Belum Tembus	1,64	0,13
<b>Total</b>	<b>1.240,30</b>	<b>100,00</b>

Sumber DPUPR Kab, Cirebon

Grafik 2.1  
 Panjang Jalan Menurut Perkerasan



Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi dapat terlihat pada Tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.8  
 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2018

Kondisi	Jalan Kabupaten	
	Km	%
Baik	568,51	45,84
Sedang	441,12	35,57
Rusak Ringan	152,36	12,28
Rusak Berat	78,29	6,31
<b>Total</b>	<b>1.240,30</b>	<b>100</b>

Sumber DPUPR Kab, Cirebon

Grafik 2.2  
 Panjang Jalan Menurut Kondisi



Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Berkala/Periodik, Rehabilitasi dan Rutin jalan dan jembatan dilakukan setiap tahun pada jalan kabupaten Tahun 2015-2018 sepanjang dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.9  
Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Tahun	Km
2015	92,81
2016	152,47
2017	117,79
2018	93,05

Sumber DPUPR Kab. Cirebon

Grafik 2.3  
Pembangunan dan Peningkatan Jalan



Tabel 2.10  
Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

Tahun	Unit
2015	15
2016	11
2017	10
2018	8

Sumber DPUPR Kab. Cirebon

Grafik 2.4  
Pembangunan dan Peningkatan Jembatan



Tabel 2.11  
Rehabilitasi/ Pemeliharaan  
Periodik/Berkala/Rutin

Tahun	Km
2015	781,12
2016	810,15
2017	792,43
2018	614,75

Sumber DPUPR Kab. Cirebon

Grafik 2.5  
Rehabilitasi/ Pemeliharaan  
Periodik/Berkala/Rutin



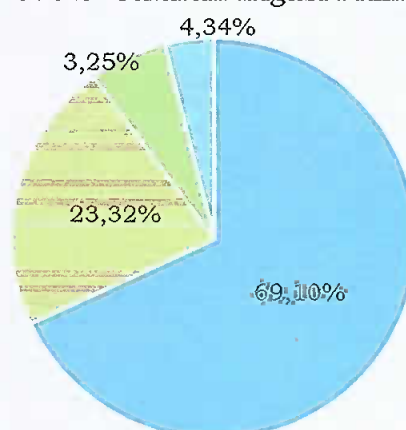
Panjang Saluran Irigasi Berdasarkan Kondisi dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :



Tabel 2.12  
Kondisi Saluran Irigasi Primer

Kondisi	Saluran Irigasi Primer	
	M	%
Baik	97.764,00	69,10
Rusak Ringan	33.000,00	23,32
Rusak Berat	4.594,00	3,25
Belum ada Pasangan	6.134,00	4,34
<b>Total</b>	<b>141.492,00</b>	<b>100,00</b>

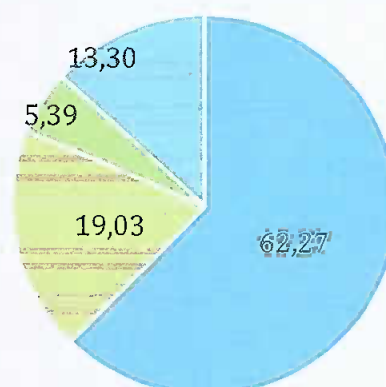
Grafik 2.6  
Kondisi Saluran Irigasi Primer



Tabel 2.13  
Kondisi Saluran Irigasi Sekunder

Kondisi	Saluran Irigasi Sekunder	
	M	%
Baik	18.751	62,27
Rusak Ringan	5.732	19,03
Rusak Berat	1.624	5,39
Belum ada Pasangan	4.006	13,30
<b>Total</b>	<b>30.113</b>	<b>100,00</b>

Grafik 2.7  
Kondisi Saluran Irigasi Sekunder



Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap				92,11%	96,86%	100%	78,93%	81,40%	82,50%	85,69%	84,04%	82,50%
			Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (Km)		1.142,44	1.201,36	1.240,30	978,97	1.009,64	1.023,25	85,69%	84,04%	82,50%
2	Intensitas Tanam				230,00%	240,00%	250%	251,13%	251,64%	252%	109,19%	100,66%	100,88%
			Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (M)					106.853	116.515	118.000			
3	prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital				50,00%	75,00%	100%	40,00%	95,00%	100%	80,00%	126,67%	100,00%

Dilihat dari anggaran, rata-rata penyerapan anggaran 89 – 99 %. Sedangkan untuk alokasi anggaran pelayanan Kebinarmargaan dirata-ratakan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan			
	2015 (4)	2016 (5)		2015 (9)	2016 (10)	2015 (14)	2016 (15)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)									
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>796.904.045</b>	<b>981.072.312</b>	<b>113,84%</b>	<b>140,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>504.480.000</b>	<b>548.728.600</b>	<b>577.880.088</b>	<b>754.450.182</b>	<b>114,55%</b>	<b>137,49%</b>	<b>0,09</b>	<b>0,31</b>	
- Hasil Retribusi Daerah	504.480.000	548.728.600	577.880.088	754.450.182	114,55%	137,49%	0,09	0,31	
<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>195.520.000</b>	<b>151.271.400</b>	<b>219.023.957</b>	<b>226.622.130</b>	<b>112,02%</b>	<b>149,81%</b>	<b>(0,23)</b>	<b>0,03</b>	
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	195.520.000	151.271.400	219.023.957	226.622.130	112,02%	149,81%	(0,23)	0,03	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>8.061.785.000</b>	<b>8.378.723.400</b>	<b>7.961.456.796</b>	<b>8.090.607.825</b>	<b>98,76%</b>	<b>96,56%</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	
- Belanja Pegawai	8.061.785.000	8.378.723.400	7.961.456.796	8.090.607.825	98,76%	96,56%	0,04	0,02	
<b>Belanja Langsung</b>	<b>263.931.379.828</b>	<b>302.313.668.294</b>	<b>169.870.553.848</b>	<b>269.546.812.056</b>	<b>64,36%</b>	<b>89,16%</b>	<b>0,15</b>	<b>0,59</b>	
- Belanja Pegawai	2.054.002.000	2.702.894.000	1.985.020.000	2.452.949.000	96,64%	90,75%	0,32	0,24	
- Belanja Barang dan Jasa	34.788.998.578	19.849.761.768	32.641.489.138	17.503.236.296	93,83%	88,18%	(0,43)	(0,46)	
- Belanja Modal	227.088.379.250	279.761.012.526	135.244.044.710	249.590.626.760	59,56%	89,22%	0,23	0,85	

Tabel T-C.24.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan

Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015 (4)	2016 (5)	2015 (9)	2016 (10)	2015 (14)	2016 (15)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>110.000.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>110.929.431</b>	<b>110.049.485</b>	<b>100,84%</b>	<b>127,96%</b>	<b>(0,22)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>110.000.000</b>	<b>86.000.000</b>	<b>110.929.431</b>	<b>110.049.485</b>	<b>100,84%</b>	<b>127,96%</b>	<b>(0,22)</b>	<b>(0,01)</b>
- Hasil Retribusi Daerah	110.000.000	86.000.000	110.929.431	110.049.485	100,84%	127,96%	(0,22)	(0,01)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>15.663.765.000</b>	<b>16.307.041.000</b>	<b>15.415.149.847</b>	<b>15.693.804.072</b>	<b>98,41%</b>	<b>96,24%</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>
- Belanja Pegawai	15.663.765.000	16.307.041.000	15.415.149.847	15.693.804.072	98,41%	96,24%	0,04	0,02
<b>Belanja Langsung</b>	<b>57.962.705.936</b>	<b>109.349.249.642</b>	<b>53.843.645.076</b>	<b>104.752.338.538</b>	<b>92,89%</b>	<b>95,80%</b>	<b>0,89</b>	<b>0,95</b>
- Belanja Pegawai	3.366.342.000	4.534.069.000	3.212.248.000	4.390.983.000	95,42%	96,84%	0,35	0,37
- Belanja Barang dan Jasa	21.796.220.712	18.506.103.812	20.325.244.476	17.711.222.368	93,25%	95,70%	(0,15)	(0,13)
- Belanja Modal	32.800.143.224	86.309.076.830	30.306.152.600	82.650.133.170	92,40%	95,76%	1,63	1,73

**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Cirebon**

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>650.000.000</b>	<b>850.000.000</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.004.040.487</b>	<b>920.152.548</b>	<b>1.045.000.000</b>	<b>154,47%</b>	<b>108,25%</b>	<b>110,00%</b>	<b>0,21</b>	<b>0,02</b>			
Pendapatan Asli Daerah	554.253.700	653.575.000	750.862.100	794.492.469	791.003.952	825.948.310	143,34%	121,03%	110,00%	0,15	0,02			
- Hasil Retribusi Daerah	554.253.700	653.575.000	750.862.100	794.492.469	791.003.952	825.948.310	143,34%	121,03%	110,00%	0,15	0,02			
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	95.746.300	196.425.000	199.137.900	209.548.018	129.148.596	141.690.167	218,86%	65,75%	71,15%	0,53	(0,15)			
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	95.746.300	196.425.000	199.137.900	209.548.018	129.148.596	141.690.167	218,86%	65,75%	71,15%	0,53	(0,15)			
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>21.281.087.685</b>	<b>24.058.483.750</b>	<b>26.381.311.500</b>	<b>19.817.866.181</b>	<b>23.200.003.933</b>	<b>25.399.793.290</b>	<b>93,12%</b>	<b>96,43%</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>			
- Belanja Pegawai	21.281.087.685	24.058.483.750	26.381.311.500	19.817.866.181	23.200.003.933	25.399.793.290	93,12%	96,43%	96,05%	0,11	0,13			
<b>Belanja Langsung</b>	<b>307.858.515.072</b>	<b>354.710.474.659</b>	<b>320.098.482.746</b>	<b>300.583.847.088</b>	<b>286.354.041.861</b>	<b>293.734.916.426</b>	<b>97,64%</b>	<b>80,73%</b>	<b>91,76%</b>	<b>0,02</b>	<b>(0,01)</b>			
- Belanja Pegawai	8.352.677.000	8.998.388.000	9.194.530.000	8.009.257.000	7.779.752.000	8.610.962.156	95,89%	86,46%	93,65%	0,05	0,03			
- Belanja Barang dan Jasa	35.310.218.232	40.199.244.929	66.828.683.480	32.677.777.588	33.833.387.972	61.092.284.699	92,54%	84,16%	91,42%	0,27	0,24			
- Belanja Modal	264.195.619.840	305.512.841.730	244.075.269.266	259.896.812.500	244.740.901.889	223.718.259.211	98,37%	80,11%	91,66%	(0,05)	(0,08)			

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk menjapai tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah kabupaten cirebon tahun 2019-2024, ada beberapa tantangan yang muncul dan dihadapi adalah :

1. Tuntutan dari masyarakat akan mutu konstruksi yang handal, keselamatan, dan penanganan banjir serta kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan yang berwawasan lingkungan (sustainable development) dan mempunyai nilai estetika;
2. Keterbatasan kewenangan pada penanganan pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan berlatar belakang teknik khususnya bidang pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Terdapatnya penyedia jasa yang belum optimal dalam melaksanakan Kegiatan-Kegiatan di bidang pekerjaan umum;
5. Belum optimalnya keselarasan anggaran pembangunan infrastruktur yang tersedia dengan tingkat kebutuhan penanganan infrastruktur sehingga tingkat capaian yang menjadi target prioritas belum dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang telah direncanakan;
6. Kendala cuaca yang tidak menentu dan ekstrem sehingga pelaksanaan pekerjaan dilapangan menjadi kurang optimal.
7. Belum adanya Peraturan Daerah tentang rencana detail ruang kawasan.

Sedangkan peluang yang ada perlu dimanfaatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 240 orang dan adanya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah sejumlah 8 UPTD Pengelolaan

Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan sehingga semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Peralatan Perbengkelan dan UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi;

3. Adanya bantuan keuangan provinsi ataupun Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan pada setiap tahunnya;
4. Adanya sistem pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui non APBD.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang daerah saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air yang dimiliki sebanyak 77 Daerah Irigasi dengan luasan areal 10.224 Ha dengan kondisi saluran pada akhir tahun 2018, kondisi baik sebesar 67,89 % sedangkan kondisi Rusak Ringan dan Berat 26,20 % serta Belum ada pemasangan 5,91% berdasarkan data diatas bahwasannya kondisi infrastruktur SDA dapat dikategorikan sudah baik hanya permasalahan yang dihadapi ketergantungan terhadap sumber air tinggi, dikarenakan sumber – sumber air yang ada lebih banyak diluar Kabupaten Cirebon. Untuk Infrastruktur jalan, dari panjang jalan Kabupaten sampai saat ini sepanjang 1.240,30 Km, kondisi Baik dan Sedang (mantap) mencapai 81,40 %, rusak ringan 12,28% dan rusak berat 6,31%, serta belum optimalnya pengaturan tata ruang wilayah dikarenakan belum seluruhnya wilayah yang memiliki Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang.

### 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Bab ini akan akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang pencapaian target yang belum terealisasi pada RPJMD 2014 – 2019 berdasarkan kepada tugas pokok dan fungsi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil dari capaian yang sudah dilaksanakan lima tahun pada periode sebelumnya seluruh program dan kegiatan sudah berjalan dengan baik, hanya dalam pencapaian target belum sesuai dengan rencana



yang sudah ditetapkan pada RPJMD yang lalu. Adapun permasalahan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-B 35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Tingkat Kerusakan Jalan Cukup Cepat dan tingkat laju pertumbuhan kendaraan meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan jalan yang melebihi tonase</li> <li>2. Terdapatnya genangan air pada Badan Jalan</li> <li>3. Kondisi Struktur Tanah yang labil</li> <li>4. Adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi kelas jalan dan belum optimalnya pembuatan jalan baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban Angkutan yang melebihi MST</li> <li>2. Adanya Penggunaan daerah milik jalan Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan</li> <li>3. Adanya Saluran/Drainase jalan yang dipergunakan bukan untuk peruntukannya</li> <li>4. Terkendalanya pembebasan lahan</li> <li>5. Adanya Ruas-ruas yang membutuhkan tembok penahan tanah jalan dan salura/Drainase jalan</li> </ol>
2	Adanya beberapa wilayah Rawan Banjir dan Kekeringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Sedimentasi saluran dan longsor</li> <li>2. Tembok Panahan Tebing atau Tanggul mengalami kebocoran dan roboh</li> <li>3. Terbatasnya kewenangan penanganan Sungai dan Daerah Irigasi</li> <li>4. Tidak memiliki sumber air</li> <li>5. Letak geografis kabupaten cirebon pada dataran rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampah yang dibuang ke sungai dan Saluran Irigasi</li> <li>2. Tingginya tingkat pertumbuhan tanaman liar/gulma</li> <li>3. Daya Rusak Air pada saat musim penghujan</li> <li>4. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal</li> <li>5. Adanya bangunan liar pada sempadan irigasi dan sungai</li> <li>6. Adanya air pasang Laut</li> </ol>
3	Belum seluruh wilayah yang memiliki peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya aturan perundang-undangan yang mengikat dalam proses penyusunannya</li> <li>2. Keterbatasan anggaran yang belum mengarah kepada percepatan ketersediaan peraturan tersebut</li> </ol>	Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan tata ruang wilayah

## **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD**

### **3.2.1 Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan akademik di dalam mencapai harapan dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Cirebon serta mempertimbangkan aspek budaya yang ada di masyarakat Kabupaten Cirebon, maka visi pemerintah daerah pada tahun 2019 – 2024 yang ingin dicapai.

#### **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Dalam rangka untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan visi, misi serta program pembangunan daerah. Tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat terutama Infrastruktur Jalan, Irigasi, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang serta menunjang bidang lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peranan yang penting untuk menunjang pencapaian misi pembangunan daerah tahun 2019-2024, dalam hal menunjang pencapaian :

Misi 4 :

**“KABUPATEN CIREBON MAJU”**

“Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”

Tabel 3.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

Visi : <b>Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman</b>				
No.	Misi dan Program Pembangunan Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 4 : <b>KABUPATEN CIREBON MAJU</b> Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah			

No.	Misi dan Program Pembangunan Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Sasaran : Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah Indikator : Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap(Baik) Strategi : Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, transportasi yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah Kebijakan : Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan konektivitas antar wiayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan. Program Pembangunan Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan infrastruktur daerah perbatasan</li> <li>2. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air</li> <li>3. Pengendalian dan Pemanfaatan ruang</li> <li>4. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju Tingkat Kerusakan Jalan Cukup Cepat dan tingkat laju pertumbuhan kendaraan meningkat</li> <li>2. Adanya beberapa wilayah rawan banjir dan kekeringan</li> <li>3. Belum seluruh wilayah yang memiliki peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan</li> <li>4. Adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi kelas jalan dan belum optimalnya pembuatan jalan baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan Jalan yang melebihi tonase;</li> <li>2. Adanya Penggunaan daerah milik jalan dan Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan</li> <li>3. Sedimentasi sungai, saluran pembuang dan saluran irigasi;</li> <li>4. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal</li> <li>5. Terbatasnya kewenangan penanganan Sungai dan Daerah Irigasi;</li> <li>6. Adanya perusahaan penyedia yang kurang optimal</li> <li>7. Terkendalanya pembebasan lahan</li> <li>8. Adanya aturan perundangan-undang yang mengikat dalam proses penyusunannya</li> <li>9. Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen bersama untuk penanganan dan pengelolaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum oleh pemerintah;</li> <li>2. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya;</li> <li>3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas;</li> </ol>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang :

**“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Berdasarkan mandat yang diemban oleh kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi kementerian pekerjaan umum, maka untuk mencapai visi kementerian pekerjaan umum maka ditetapkan misi, sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kement PU	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Ketahanan Air	Daerah irigasi cukup luas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki sumber air</li> <li>2. Ketergantungan terhadap penyediaan air pada kabupaten lain</li> <li>3. Kurangnya bangunan tangkapan/ tampungan air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kewenangan dan komitmen untuk penyelenggaraan penanganan Infrastruktur Pekerjaan Umum oleh Dinas;</li> <li>2. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya</li> <li>3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas</li> </ol>
2	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	1. Laju Tingkat Kerusakan Jalan Cukup Cepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan jalan yang melebihi tonase;</li> <li>2. Fungsi Saluran/Drainase yang kurang optimal.</li> </ol>	Adanya program pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan

#### 3.4. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian PUPR untuk pencapaian sasaran dan tujuan Kementerian PUPR serta sasaran-sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019. Tujuan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015 - 2019 meliputi :

1. Menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur PUPR bidang Sumber Daya Air untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy guna menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2. Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA adalah mewujudkan kehandalan infrastruktur sumber daya air dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dirjen SDA Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya dukungan untuk ketahanan air	Ketergantungan terhadap sumber air sangat tinggi	Sulitnya Penyediaan lahan untuk bangunan penampungan air yang representatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya</li> <li>2. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas</li> </ol>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dirjen SDA Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan energi	Terbatasnya kewenangan penanganan Daerah Irigasi	Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komisi Irigasi;</li> <li>2. Adanya forum TKPSDA</li> <li>3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas</li> </ol>

### 3.5. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga

Tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah : **Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.**

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah	Laju tingkat kerusakan jalan lebih cepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan Jalan yang melebihi tonase</li> <li>2. Kurang berfungsinya Saluran/ Drainase Jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas</li> <li>2. Peraturan tentang pemanfaatan daerah milik jalan dan ruang milik jalan</li> </ol>



No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				3. Optimalisasi keberadaan UPTD
2.	Meningkatnya Kapasitas jalan nasional	Dibutuhkannya beberapa luas jalan yang harus dilakukan pelebaran jalan	1. Terkendalanya pembebasan lahan 2. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan	1. Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas 2. Peraturan tentang pemanfaatan daerah milik jalan dan ruang milik jalan

### 3.6. Telaahan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat harus disusun secara selaras vertikal maupun horizontal Dengan dasar pemikiran tersebut dirumuskan sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA MELALUI JARINGAN JALAN YANG MANTAP DALAM TATA RUANG YANG NYAMAN DAN BERKELANJUTAN DENGAN DIDUKUNG OLEH JASA KONSTRUKSI YANG PROFESIONAL”**

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan konektivitas jaringan jalan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
2. Meningkatkan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;
3. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.

Permasalahan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Provinsi Jawa Barat beserta penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah	Adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi kelas jalan dan belum optimalnya pembuatan jalan baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkendalanya pembebasan lahan</li> <li>2. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan</li> </ol>	Adanya Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatkan penyediaan layanan infrastruktur wilayah
2.	Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju tingkat kerusakan jalan lebih cepat</li> <li>2. Dibutuhkannya beberapa luas jalan yang harus dilakukan pelebaran jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan Jalan yang melebihi tonase</li> <li>2. Kurang berfungsinya Saluran/ Drainase Jalan</li> <li>3. Terkendalanya pembebasan lahan</li> <li>4. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan terhadap pentingnya tugas pokok dan fungsi Dinas</li> <li>2. Peraturan tentang pemanfaatan daerah milik jalan dan ruang milik jalan</li> <li>3. Optimalisasi keberadaan UPTD</li> </ol>
3.	Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Belum Seluruhnya Wilayah memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Adanya aturan perundangan-undang yang mengikat dalam proses penyusunannya	Adanya prioritas Program Daerah Kejelasan pelaksanaan dan penataan regulasi ruang
4.	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi	Belum Seluruhnya Pelaksana Jasa Kontruksi yang bersertifikat	Belum tersosialisasikannya aturan tentang jasa konstruksi	Adanya kewenangan penyelenggaraan urusan jasa konstruksi

Tujuan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat harus disusun Untuk mendukung dan mewujudkan Visi Jawa Barat dan selaras dengan visi Kementrian PU, maka Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, yaitu :

“ Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik”

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya air;
2. Meningkatnya kinerja layanan irigasi;
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan sumber daya air;
4. Terkendalinya Dampak Banjir dan Kekeringan;

Tabel 3.6.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas SDA Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Air	Ketergantungan terhadap sumber air sangat tinggi	Sulitnya Penyediaan lahan untuk bangunan penampungan air yang representatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya</li> <li>2. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas</li> </ol>
2.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Terbatasnya kewenangan penanganan Daerah Irigasi	Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komisi Irigasi;</li> <li>2. Adanya forum TKPSDA</li> <li>3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas</li> </ol>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas SDA Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Terkendalinya Dampak Banjir dan Kekeringan	Adanya beberapa wilayah rawan banjir dan kekeringan	Sampah yang dibuang pada aliran sungai dan pembuang	Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas

### 3.7. Telahaan Rencana Tata Ruang

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon, meliputi :

1. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:
  - a. pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - b. peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.
2. Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, meliputi:

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;

  - a. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
  - c. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

3. Strategi untuk peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan
- c. meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Dalam mewujudkan ruang wilayah kabupaten Cirebon sebagai pendukung PKN Cirebon maka Kabupaten Cirebon membuat suatu kebijakan dan strategi, meliputi :

1. Kebijakan Peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2. Strategi :

- a. Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional; dan
- b. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Cirebon dalam tabel berikut.

Tabel 3.7.  
Rencana Sistem Perkotaan

Pusat Kegiatan Perkotaan			
PKN	PKL	PPK	Fungsi Pelayanan
Cirebon			Industri, bisnis kelautan dan pertanian dan pertambangan mineral

PKN	PKL	PPK	Fungsi Pelayanan
	1. Arjawinangun		Kawasan Perdagangan, jasa dan Pendidikan
	2. Palimanan		Sentra Industri dan Pergudangan
	3. Sumber		Pusat Pemerintahan
	4. Lemahabang		Industri Manufaktur
	5. Ciledug		Pertanian dengan kegiatan pendukung perkotaan lainnya perdagangan, jasa, pendidikan dan agro industri
		1. Gegecik	
		2. Kapetakan	
		3. Klangeran	
		4. Plumbon	
		5. Weru	
		6. Kedawung	
		7. Astanajapura	
		8. Karangsembung	
		9. Babakan	
		10. Losari	

Tabel 3.8.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	RTRW Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan jalan baru dan Peningkatan kapasitas jalan, meliputi : 1. Pelebaran ruas jalan Kedawung – Warungasem; 2. pembangunan ruas jalan Watubelah – Pejambon; 3. pembangun ruas jalan menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan Gebang; 4. peningkatan ruas jalan Nagrak-Kalimati; 5. pembangunan ruas jalan Pejambon-Cempaka; 6. pelebaran ruas jalan Gesik-Sendang.	1. Terkendala Penyediaan lahan untuk jalan 2. Laju kerusakan jalan cukup cepat 3. tingkat laju pertumbuhan kendaraan meningkat	1. Proses pembebasan lahan yang cukup lama 2. Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan 3. Keterbatasan Anggaran 4. Pembebanan jalan yang melebihi tonase	1. Adanya komitmen semua pihak akan kebutuhan jaringan jalan; 2. Adanya OPD yang membidangi pengadaan tanah

No.	RTRW Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Peningkatan Jembatan	Banyaknya jembatan yang melebihi umur rencana	Jumlah inventarisasi jembatan kabupaten yang banyak	Alokasi anggaran yang setiap tahunnya mengalami kenaikan
3	Sistem jaringan sumber daya air, meliputi :			
	1. Sistem wilayah sungai	Terbatasnya Kewenangan DPUPR Kab. Cirebon dalam pengelolaan wilayah sungai	Belum optimalnya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air	Adanya forum TKPSDA
	2. Sumber Air dan tampungan air	Penyediaan lahan untuk tampungan air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembebasan lahan yang cukup lama</li> <li>2. Keterbatasan Anggaran</li> <li>3. Sampah yang dibuang pada saluran irigasi</li> </ol>	Adanya OPD yang membidangi pengadaan tanah
	4. jaringan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Cirebon Tidak memiliki sumber air;</li> <li>2. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik pemanfaatan air;</li> <li>2. Keterbatasan anggaran pelaksanaan OP</li> <li>3. Sampah yang dibuang pada saluran irigasi</li> <li>4. Bangunan liar dan pelanggaran sepadan saluran irigasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komisi Irigasi;</li> <li>2. Adanya Unit Pelayanan Teknis;</li> <li>3. Adanya OPD terkait yang menangani penegakan Perda.</li> </ol>
	5. sistem pengendalian banjir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak geografis kabupaten cirebon pada dataran rendah</li> <li>2. Adanya Bangunan liar pada sepadan sungai</li> <li>3. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampah yang dibuang pada aliran sungai</li> <li>2. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan sungai</li> <li>3. Terkendala pembebasan lahan</li> <li>4. Terbatasnya Kewenangan DPUPR Kab. Cirebon dalam pengelolaan wilayah sungai dan sistem jaringannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program prioritas pembangunan daerah untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air</li> <li>2. Adanya Unit Pelayanan Teknis;</li> </ol>

No.	RTRW Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	6. sistem pengamanan pantai	Adanya air pasang Laut	Terbatasnya Kewenangan DPUPR Kab. Cirebon dalam pengelolaan wilayah sungai dan sistem jaringannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program prioritas pembangunan daerah untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air</li> <li>2. Adanya Unit Pelayanan Teknis;</li> </ol>

### 3.8. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tabel 3.9.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Telaahan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	KLHS Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber-sumber air			
2.	Meningkatkan ketersediaan sumber air : Pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), Terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, embung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Cirebon Tidak memiliki sumber air;</li> <li>2. Penyediaan lahan untuk tampungan air</li> </ol>	Proses pembebasan lahan yang cukup lama	Adanya program prioritas pembangunan daerah untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
3.	Menata sistem drainase perkotaan yakni sistem prasarana drainase dalam wilayah kota yang intinya berfungsi selain untuk mengendalikan dan mengalirkan limpasan air hujan yang berlebihan dengan aman, juga untuk mengendalikan dan mengalirkan kelebihan air lainnya yang mempunyai dampak mengganggu dan/atau mencemari lingkungan perkotaan, yaitu air buangan atau air limbah lainnya Mewujudkan	Kurang berfungsinya Saluran/ Drainase Jalan	Adanya Saluran/Drainase jalan yang dipergunakan bukan untuk peruntukannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan tentang pemanfaatan daerah milik jalan dan ruang milik jalan</li> <li>2. Adanya Program Prioritas Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</li> </ol>



No.	KLHS Terkait tugas dan fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4.	Integrasi konsep lingkungan hidup ke dalam RTRW	Belum Seluruhnya Wilayah memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Adanya aturan perundangan-undang yang mengikat dalam proses penyusunannya	Adanya prioritas Program Daerah Kejelasan pelaksanaan dan penataan regulasi
5.	Pengaturan tata ruang berbasis keseimbangan ekosistem	Belum Seluruhnya Wilayah memiliki Peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Adanya aturan perundangan-undang yang mengikat dalam proses penyusunannya	Adanya prioritas Program Daerah Kejelasan pelaksanaan dan penataan regulasi ruang

### 3.9. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu - isu strategis umum yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dalam penanganan Infrastruktur sebagai berikut :

1. Mempertahankan/Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan;

Penentuan isu strategis ini dikarenakan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan kabupaten untuk menangani ruas-ruas jalan yang kondisi bagian jalan tersebut dalam kondisi rusak mengingat jalan kabupaten kondisi rusak pada saat ini sekitar 20%, yang mengakibatkan kondisi rusak tersebut oleh kelebihan beban, gangguan genangan air, penurunan kondisi tanah dasar dan erosi, sehingga dibutuhkan penanganan peningkatan struktur agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Pertumbuhan jumlah kendaraan akibat meningkatnya perekonomian masyarakat dan aktivitas masyarakat belum dapat diimbangi dengan penambahan jaringan jalan dan penambahan lebar jalan, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas jalan baik melalui penambahan jaringan jalan baru atau penambahan lebar jalan.

Untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi secara optimal dan pencegahan kerusakan jalan yang lebih luas yang diakibatkan penurunan kondisi jalan diluar dari perhitungan dalam

desain, maka untuk menangani hal-hal tersebut dibutuhkannya adanya penanganan pemeliharaan ruti, berkala dan Rehabilitasi jalan sehingga dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan jalan.

2. Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi (operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi);

Penentuan isu strategis ini karena akan kebutuhan penyediaan air untuk pertanian yang optimal sehingga dibutuhkan adanya penanganan operasi sebagai upaya untuk pengaturan air irigasi dan menjaga kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi, pemeliharaan dilakukan guna agar jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik sebagai pendukung pelaksanaan operasi, serta rehabilitasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan jaringan irigasi.

3. Penyediaan dokumen rencana detail tata ruang;

4. Peningkatan pelayanan informasi jasa kontruksi;

5. Peningkatan fungsi Drainase Jalan dan penyediaan trotoar;

Penentuan isu strategis salah satu cara untuk meminimalisir laju kerusakan jalan yang diakibatkan adanya genangan air pada badan jalan serta menciptakan rasa aman kepada pengguna jalan.

6. Pengendalian alih fungsi lahan

7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air.

Peralatan untuk mendukung pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum yang ada sebagian besar sudah kurang optimal dikarenakan adanya alat-alat berat yang sudah lama, dan adanya perkembangan penggunaan jenis kontruksi dalam penanganan jalan sehingga dibutuhkan alat-alat uji kontruksi yang memadai.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon ditempuh dengan menelaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Rancangan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal		Kondisi akhir
			2018	Perkiraan 2019	2024
1	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan, Irigasi, sumber daya air yang berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Kondisi Infrastruktur Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap) serta Meningkatnya Intensitas Tanam	166,52%	167,25	172%

### 4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dibuat secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran akan

memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta memperhatikan kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon terdiri dari :

1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten
2. Terpenuhinya penyediaan air Irigasi secara Optimal
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten yang ditarget selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 4.2 pada halaman berikutnya :

Tabel 4.2  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Tahun					Kondisi Akhir Renstra
					2018	Perkiraan 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan, Irigasi, sumber daya air yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	Indeks Kondisi Infrastruktur Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap) serta Meningkatnya Intensitas Tanam	Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten  Terpenuhi penyediaan air irigasi secara Optimal  Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang  Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal  Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan Sedang (Mantap)  Meningkatnya Intensitas Tanam  Ketaatan terhadap RTRW  Meningkatnya Persentase layanan informasi jasa konstruksi  Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	166,52%	167,25%	168%	169%	170%	171%	172%	172%
					81,40%	82,50%	83%	84%	85%	86%	87%	87%
					251,64%	252%	253%	254%	255%	256%	257%	257%
					0 %	0%	0%	5,56%	11,11%	16,67%	27,78%	27,78%
					0,00%	0%	40%	55%	70%	85%	100%	100%
					68	60,66	68,5	70	71,5	73	75	75

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 1.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan program dan Kegiatan guna mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta melihat kepada gambaran tentang kekuatan dan kelemahan yang ada, maka dibuat langkah-langkah arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan, adapun arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1  
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Cirebon

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan permukiman yang handal dan terintegrasi guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan wilayah	Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan antar wilayah dan konektivitas antar wilayah terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan berbasis keruangan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah dirumuskan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merumuskan strategi dan kebijakan berlandaskan pada arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon agar terbentuk keselarasan antara arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Cirebon, arah kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman			
Misi : 4. KABUPATEN CIREBON MAJU Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan, Irigasi, sumber daya air berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik	1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Pembangunan Jalan Baru	1. Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan Jembatan
			2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Secara Rutin ataupun Periodik/Berkala
			3. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan
			4. Peningkatan data base kondisi jalan dan jembatan
			5. Peningkatan pendataan Rumija dan damija
			6. Penambahan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
			7. Pemeliharaan Peralatan Alat-Alat Berat, Peralata Bengkel Alat Berat dan Peralatan Uji Laboratorium Bahan Kontruksi
	2. Terpenuhinya penyediaan air Irigasi secara Optimal	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bangunan Jaringan Irigasi (Pintu Air, Bendung dan lain lain)
			2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi
			3. Peningkatan Peran Komisi Irigasi
		Peningkatan Upaya Penanganan Fungsi dan Infrastruktur Sumber Air	1. Rehabilitasi Bangunan Saluran
			2. Pemeliharaan Bangunan Saluran
			3. Pembangunan Penampung Air
			4. Pemeliharaan Saluran melalui Kurasan dan Normalisasi
	3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Meningkatkan aturan perencanaan dan pengendalian pengawasan	1. Pembuatan Rencana Detail
			2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
			3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Kontruksi	1. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang jasa kontruksi
	5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Meningkatkan dan Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia Yang ada	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Sarana dan Parasana Aparatur 3. Penyediaan kebutuhan Rutin aparatur 4. Penyediaan dokumen pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta target yang harus sesuai dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

Mengacu kepada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka rencana program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Perencanaan Pembangunan Jalan
  2. Pembangunan Jalan Kabupaten
  3. Pembangunan Jembatan Kabupaten
  
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
  2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
  2. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
  3. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan
  
4. Program Inpeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Kegiatan Pemanfaatan Jalan
  
5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan
  2. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan
  
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
  2. Perencanaan Pembangunan Reservoir
  3. Rehabilitasi jaringan irigasi
  4. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
  5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
  6. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air
  7. Perencanaan Pembangunan /peningkatan / Rehabilitasi sarana dan prasarana sungai,muara dan pengaman kawasan pantai
  8. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
  9. Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air
  
7. Program Pengendalian Banjir, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Tanggul Sungai
  2. Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai
  3. Pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana muara sungai dan pengaman kawasan pantai

4. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana muara sungai dan pengaman kawasan pantai
  5. Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air
  6. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air
8. Program Perencanaan Tata Ruang, meliputi kegiatan-kegiatan :
1. Penetapan Kebijakan tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Pembahasan Raperda tentang RDTRK)
  2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
  3. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
  4. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
  2. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
  3. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
  4. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
  5. Pengawasan pemanfaatan ruang
  6. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
  7. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, meliputi kegiatan-kegiatan :
1. Pengadaan alat-alat berat
  2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
  3. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
  4. Rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat
  5. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
  6. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

11. Program Pengaturan Jasa Kontruksi, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Bimtek Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  2. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
  2. Penyediaan jasa jaminan barang mllik daerah
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
  4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
  8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  11. Penyediaan Makanan dan Minuman
  12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Pembangunan Gedung Kantor
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
  
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  2. Pengadaan pakaian kerja lapangan
  3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  
16. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor, meliputi kegiatan-kegiatan :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor -Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

## 6.2 Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

## 6.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon adalah Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan Pendanaan indikatif dan Belanja Daerah APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Dana Alokasi Khusus (DAK) . Adapun Alokasi pendanaan indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta rencana program, , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan	Kondisi Awal		Saluran	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2018	2019		2020		2021		2022		2023				2024			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan, Irigasi, sumber daya air yang baik berbasis Penataan Ruang melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik				Indeks Kondisi Infrastruktur Jaringan Jalan Kondisi Baik dan Intensitas Tanam	166.52	167.25	Prosen	168.00	866,531,950,000	169	241,869,895,101	170	270,150,000,000	171	263,915,000,000	172	301,389,500,000	172.00	1,943,854,355,101		
Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten				Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	81.40	82.50	Prosen	83.00	712,327,365,300	84.00	199,892,000,000	85.00	212,680,000,000	86.00	200,130,000,000	87.00	225,910,000,000	87.00	1,550,949,365,300		
15.			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	45.81	47.00	Prosen	48.00	683,014,564,766	49.00	149,332,500,000	50.00	159,280,000,000	51.00	147,280,000,000	52.00	170,950,000,000	52.00	1,283,867,064,766		
15.01.			Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Desain teknis perencanaan Peningkatan jalan dan jembatan	4	14	Dok	3	355,100,000	4	500,000,000	5	600,000,000	5	600,000,000	5	600,000,000	22	2,855,100,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
15.03.			Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	466.37	516.37	Km	15	619,033,234,766	30	120,000,000,000	30	131,247,200,000	25	116,680,000,000	25	137,144,212,000	125	1,124,104,646,766	BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN JEMBATAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	0.38	0.38	Km					2.3		1.38		3.43		7.11			
15.05.			Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang ditingkatkan	44	67	Unit	10	43,626,230,000	9	22,832,500,000	10	27,442,800,000	10	30,000,000,000	10	33,205,788,000	49	157,107,318,000	BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN JEMBATAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah jembatan yang dibangun	2	2	Unit			2		0		1		0		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	3.59	4.21	Prosen	4.33	17,508,662,934	4.45	8,000,000,000	4.57	8,000,000,000	4.57	8,000,000,000	4.82	8,000,000,000	4.82	40,508,662,934			
	16.01.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Dokumen desain teknis perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan	4	5	Dok	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	20	750,000,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	16.03.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Penjang Saluran, Sederan dan Trotoar yang terbangun	100,075.80	114,990.80	M	2,090	17,358,662,934	2,090	7,850,000,000	2,090	7,850,000,000	2,090	7,850,000,000	2,090	7,850,000,000	2,090	10,450	48,758,662,934	BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN JEMBATAN	Kabupaten Cirebon
	18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Bangunan Pelengkap jalan yang dibangun (Gorong-gorong)	614.75	662.92	Km	306	28,245,401,600	633	43,459,500,000	630	40,400,000,000	630	40,400,000,000	630	41,000,000,000	632	42,610,000,000	195,714,901,600		
	18.01.	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Tersedia/dokumen teknis perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	4.00	8.00	Dok	3	255,500,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	8	40	2,065,500,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	18.03.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara rutin	602.03	627.38	Km	286	25,189,901,600	600	40,959,500,000	600	37,900,000,000	600	37,900,000,000	600	38,500,000,000	600	600	183,049,401,600	BIDANG PEMELIHARAAN JALAN JEMBATAN	Kabupaten Cirebon
	18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara Periodik	31.92	67.56	Km	20		33		30				30		32	145			
	20.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang terpelihara	168.00	169.00	Unit	168	1,800,000,000	168	2,200,000,000	168	2,200,000,000	168	2,200,000,000	168	2,200,000,000	168	840	10,600,000,000	BIDANG PEMELIHARAAN JALAN JEMBATAN	Kabupaten Cirebon
	20.04.	Pemantauan Jalan	Prosentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	0.769	0.769	Prosen	0.764	173,406,000	0.759	300,000,000	0.754	300,000,000	0.754	300,000,000	0.750	350,000,000	0.746	0.746	1,473,406,000		
	20.04.	Pemantauan Jalan	Jumlah Laporan Pemantauan Ruang milik Jalan yang dipergunakan masyarakat	0.00	2.00	Dok	2	173,406,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	350,000,000	2	10	1,473,406,000	BIDANG PEMELIHARAAN JALAN JEMBATAN	Kabupaten Cirebon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Informasi Database Jalan dan Jembatan	100.00	100.00	100.00	Prosen	100	900,845,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	500	2,900,845,000		
	22.01.	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Jumlah dokumen data kondisi jalan	4.00	4.00	8.00	Dok	2	530,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	20	1,730,000,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	22.02.	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jembatan	Jumlah dokumen data kondisi jembatan	4.00	4.00	8.00	Dok	2	370,845,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	20	1,170,845,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Persentase bertambahnya peralatan pendukung pengelolaan infrastruktur PUPR	81.24	82.51	82.51	Prosen	87.27	2,484,485,000	90.41	4,300,000,000	93.73	4,200,000,000	96.86	3,000,000,000	100.00	3,500,000,000	100	17,484,485,000		
	23.04.	Pengadaan Alat-alat Berat	Bertambahnya jumlah alat-alat berat	59	60	60	Unit	2	954,500,000	3	2,623,000,000	4	2,523,000,000	3	1,323,000,000	3	1,823,000,000	23	9,246,500,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	23.05.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Bertambahnya jumlah peralatan bengkel alat-alat berat	43	49	49	Unit	7	50,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	50	290,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	23.06.	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan	Bertambahnya Jumlah alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum	144	150	150	Unit	11	324,985,000	4	360,000,000	4	360,000,000	4	360,000,000	4	360,000,000	31	1,764,985,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	23.10.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	jumlah alat-alat berat yang dipelihara	26	26	26	Unit	27	850,000,000	35	950,000,000	35	950,000,000	35	950,000,000	35	950,000,000	194	4,650,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	23.11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Bengkel Alat-alat Berat	jumlah peralatan bengkel alat-alat berat yang dipelihara	72	72	72	set/pak/ bolobol/ mtr/ kg	72	5,000,000	72	7,000,000	72	7,000,000	72	7,000,000	72	7,000,000	360	33,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	23.12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmagaan	jumlah alat-alat laboratorium Kebinarmagaan yang dipelihara	20.00	20.00	20.00	Unit/Buah	20	300,000,000	20	300,000,000	20	300,000,000	20	300,000,000	20	300,000,000	20	1,500,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	Terpenuhi secara Optimal	penyediaan air irigasi	lentingkatnya persentase Intensitas Tanam	251.64	252.00	252.00	Prosen	253	142,256,250,000	254	31,381,805,101	255	46,845,000,000	256	53,170,000,000	257	64,864,500,000	257	317,983,652,000		
	24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	67.89	68.76	68.76	Prosen	69.92	138,281,850,000	70.51	21,381,895,101	72.84	34,576,500,000	75.75	36,384,500,000	78.67	40,384,500,000	78.67	272,949,555,101		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	24.01.		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen desain teknis perencanaan Jaringan Irigasi	0,00	7,00	Dok	3	242,500,000	3	250,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	4	500,000,000	35	1,992,500,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	24.03.		Perencanaan Pembangunan Reservoir	Jumlah dokumen desain teknis Pembangunan Reservoir	6,00	9,00	Dok	1	180,000,000	1	186,805,101	1	200,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,066,805,101	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	24.10.		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	34,727.68	34,727.68	Meter	4,300	43,975,500,000	2,000	10,000,000,000	7,740	20,705,160,000	8,640	24,355,760,000	9,840	26,355,760,000	32,520	125,392,180,000	BIDANG IRIGASI	Kabupaten Cirebon
	24.16.		Pembiayaan Petani Pemakai Air	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang RTTG, RTTD	0	3	Kali	3	395,995,500	3	400,000,000	3	400,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	15	2,095,995,500	BIDANG IRIGASI	Kabupaten Cirebon
	24.18.		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air	Luas area Sungai yang terpelihara	0	0	M <sup>2</sup>	6,272.37	4,650,000,000									110			
	24.19.		Perencanaan/Peningkatan/Rehabilitasi Serana dan Muara Prasarana Sungai dan Pengaliran Kawasan Pantai	Tersedianya desain teknis Penanganan Serana Prasarana Sungai dan Muara Pantai	3	6	dokumen	4	421,000,000	4	425,000,000	4	425,000,000	9	450,000,000	9	450,000,000	45	2,171,000,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	24.20.		Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara	0	0	M	4,646	7,357,064,500	4,892	10,100,000,000	5,174	12,346,740,000	5,222	12,368,740,000	4,644	12,368,740,000	24,578	54,621,284,500	BIDANG IRIGASI	Kabupaten Cirebon
	24.21.		Pemeliharaan dan Peningkatan Sumber Air	Luas sendiran Sungai yang ditingkatkan dan dibangun	38,681.70	38,681.70	M <sup>2</sup>	7,805.61	81,059,850,000									7,805.61	81,059,850,000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	Kabupaten Cirebon
	28.		Program Pengendalian Banjir	Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	3.85	3.85	Prosen	3.66	3,974,400,000	3.47	10,000,000,000	3.28	12,268,100,000	3.09	14,805,500,000	2.89	24,500,000,000	2.89	65,548,000,000		
	28.03.		Rehabilitasi/pemeliharaan bentaran dan tanggul sungai	Panjang Bentaran tanggul Sungai yang direhab dan terpelihara	0	0	m <sup>3</sup>	4,807.81	2,874,400,000	4,561.72	2,000,000,000	4,561.72	2,200,000,000	5,026.69	2,000,000,000	8,568.22	7,500,000,000	27,321.54	16,574,400,000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	Kabupaten Cirebon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	28.12.	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengamanan Pantai	Panjang sarana dan prasarana muara sungai dan pengamanan kawasan pantai yang dibangun dan ditingkalkan	5,734	5,734	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770.02	1,305,500,000	3,427,29	3,000,000,000	19,327,34	4,305,500,000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	Kabupaten Cirebon
	28.13.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Muara Sungai dan Pengamanan Pantai	Pemeliharaan sarana muara sungai dan pengamanan kawasan pantai yang di Rehab dan dipelihara	0	0	0	0	1,839.89	1,100,000,000	1,739	1,000,000,000	2,000	1,268,100,000	3,000	2,000,000,000	5,712,15	5,000,000,000	26,268,17	10,368,100,000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	Kabupaten Cirebon
	28.14	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air	Luasan sendiran Sungai yang ditingkalkan dan dibangun	38,681.70	38,681.70	0	0	0	0	7,066,01	4,000,000,000	6,450,92	5,000,000,000	5,964,47	5,000,000,000	5,331,34	5,000,000,000	24,742,74	19,000,000,000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	Kabupaten Cirebon
	28.15	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air	Luas area Sungai yang terpelihara	0	0	0	0	0	0	5,778,18	3,000,000,000	5,805,83	3,800,000,000	5,655,03	4,500,000,000	4,569,72	4,000,000,000	21,808,76	15,300,000,000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	Kabupaten Cirebon
	35.	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketepatan terhadap RTRW	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5,000,000,000	5.56	5,000,000,000	11.11	5,000,000,000	16.87	5,000,000,000	27.78	5,000,000,000	27.78	25,000,000,000		
	35.01.	Persentase pemenuhan dokumen rencana tata ruang		13.95	23.26	23.26	23.26	23.26	3,556,400,000	32.56	3,700,000,000	44.19	3,700,000,000	55.81	3,700,000,000	65.12	3,700,000,000	65.12	18,358,400,000		
	35.02.	Pencapaian kebijakan tentang RDRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah Draft Perda tentang RDRK, RTRK, dan RTBL yang dibahas	0	0	0	0	1	1,381,732,340	1	1,250,000,000	1	1,250,000,000	1	1,250,000,000	1	1,250,000,000	5	6,381,732,340	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	35.05.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen Matrik Teknis RDRK, peta analog, peta digital, dan Draft Perda tentang RDRK	0	2	2	2	1	950,136,980	1	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1	1,200,000,000	1	1,200,000,000	5	5,750,136,980	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	35.06.	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen Matrik teknis/kajian RTRK dan Draft Perda tentang Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon	0	2	2	2	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	5	3,750,000,000	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	35.07.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen Matrik teknis RTBL	0	0	0	0	1	474,530,680	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	2,474,530,680	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	37.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketataan pemanfaatan ruang				Prosen	100,00	1,443,600,000	100	1,300,000,000	100	1,300,000,000	100	1,300,000,000	100	1,300,000,000	100	6,643,600,000		
	37.01.	Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan	0	119		Dok	100	133,750,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	500	993,750,000	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	37.03.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang	Jumlah Media Sosialisasi Informasi mengenai pemanfaatan ruang dan pengamanan aset tanah milik negara	0	11		Buah	600	500,000,000	600	350,000,000	600	350,000,000	600	350,000,000	600	350,000,000	2400	1,900,000,000	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	37.04.	Pelatihan apertur dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	0	0		Pegawai	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	250	625,000,000	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	37.05.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi pemanfaatan ruang	0	0		Kali	5	249,850,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	25	1,249,850,000	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	37.06.	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Informasi balas wilayah antara kabupaten dan kota	0	0		Dok.	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	5	625,000,000	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	37.07.	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi pemanfaatan ruang	0	0		Kali	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	25	1,250,000,000	BIDANG PENATAAN RUANG	Kabupaten Cirebon
	Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal			Persentase layanan Informasi jasa konstruksi	0	0	Prosen	40	352,850,000	55	300,000,000	70	300,000,000	85	300,000,000	100	300,000,000	100	1,652,850,000		
	31.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	0	0		Prosen	20	352,850,000	40	300,000,000	60	300,000,000	80	300,000,000	100	300,000,000	100	1,652,850,000		
	31.02.	Bimtek Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Pekerja pada Penyelenggara Jasa Konstruksi yang bersertifikat	0	0		Orang	120	242,850,000	120	200,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000	600	1,042,850,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon
	31.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengaluran Jasa Konstruksi	0	0		Dok	2	110,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	510,000,000	BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Cirebon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan			Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	68	80,66	Poin	68,5	6.594.594,700	70	5.315.000,000	71,5	5.315.000,000	73	5.315.000,000	75	5.315.000,000	75	27.854.584,700		
	01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas	0	100	Prosen	100	2.189.179,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	2.000.000,000	100	10.189.179,000		
	01.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselesainya Jasa komunikasi, Listrik, air dan PBB	12	12	Bulan	12	503.730,000	12	530.000,000	12	530.000,000	12	530.000,000	12	530.000,000	60	2.623.730,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.05.		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan Dinas yang terjamin Asuransi	7	23	unit	23	70.000,000	23	70.000,000	23	70.000,000	23	70.000,000	23	70.000,000	115	350.000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.06.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang terjamin perizinannya	163	154	unit	165	107.300,000	165	107.300,000	165	107.300,000	165	107.300,000	165	107.300,000	825	536.500,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.09.		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja Yang dipelihara	225	215	unit	346	150.000,000	230	65.000,000	230	65.000,000	230	65.000,000	230	65.000,000	1.266	410.000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.10.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	5.483	6.521	bb/ln/dus	5.048	120.000,000	4.073	90.000,000	4.073	90.000,000	4.073	90.000,000	4.073	90.000,000	16.297	480.000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.11.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan dan percetakan yang tersedia	141.908	141.906	bb/buku/lbr	148.335	90.000,000	123.075	80.000,000	123.075	80.000,000	123.075	80.000,000	123.075	80.000,000	492.448	410.000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.12.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen listrik yang tersedia	692	692	bhs/et	672	26.970,000	635	20.000,000	635	20.000,000	635	20.000,000	635	20.000,000	3.212	106.970,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.13.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	224	173	unit/bh/set	192	645.025,000	100	316.541,000	100	316.541,000	100	316.541,000	100	316.541,000	592	1.911.189,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.14.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	529	739	bb/pak/pcs/kaleng/ set	726	39.999,000	635	25.000,000	635	25.000,000	635	25.000,000	635	25.000,000	3.266	139.999,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.15.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	28.701	28.701	eks	28.701	96.159,000	28.701	96.159,000	28.701	96.159,000	28.701	96.159,000	28.701	96.159,000	144	480.795,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.17.		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Arispatis yang tersedia	2.975	4.209	Ok	3.149	39.999,000	1.293	25.000,000	1.293	25.000,000	1.293	25.000,000	1.293	25.000,000	5.175	139.999,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.18.		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Surat Tugas Perjalanan Dinas yang dikeluarkan	100		surat	120	300.000,000	120	325.000,000	120	325.000,000	120	325.000,000	120	325.000,000	600	1.600.000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	01.21	Penyelesaian Kemanan dan Keterlibatan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan/Keterlibatan	0	0	0	Orang	6	0	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	22	800,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	01.30	Penilaian Arsip	Jumlah Dokumen yang dikalibrasi dan disiapkan	12,000	12,000	12,000	Dokumen	12,000	0	12,000	50,000,000	12,000	50,000,000	12,000	50,000,000	12,000	50,000,000	12,000	200,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang peningkatan kinerja	100	100	100	Prosen	100	4,247,700,000	100	3,000,000,000	100	3,000,000,000	100	3,000,000,000	100	3,000,000,000	100	16,247,700,000		
	02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang dibangun	0	1	1	Bangunan	1	2,100,000,000	0	-	0	-	0	-	0	0	1	2,100,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	-
	02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	153	153	153	Unit	0	-	16	921,265,000	5	833,149,000	0	-	0	0	21	1,754,414,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara secara berkala	0	7	7	Bangunan	2	192,700,000	2	192,700,000	2	192,700,000	2	192,700,000	2	192,700,000	10	953,500,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara	0	12	12	Unit	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	60	3,750,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terjamin kondisinya	139	156	156	Buah	168	680,000,000	168	680,000,000	173	748,212,000	178	789,792,000	178	789,792,000	865	3,707,796,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	02.26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perengkapan Kantor yang dipelihara	92	183	183	Unit	183	65,000,000	183	65,000,000	183	65,000,000	183	65,000,000	183	65,000,000	915	325,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0	6	6	Bangunan	1	450,000,000	1	381,035,000	1	410,939,000	3	1,202,508,000	3	1,202,508,000	9	3,646,990,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya paksaan pegawai sebagai penunjang disiplin Pegawai	100	100	100	Prosen	0	-	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	600,000,000		
	03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	315	0	0	stell	0	-	0	-	681	150,000,000	-	-	0	-	681	150,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	03.03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian untuk pekerja Lapangan	678	678	678	Buah	0	-	681	150,000,000	0	-	0	-	681	150,000,000	1,362	300,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon
	03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari tertentu pegawai	0	0	0	Stell	0	-	0	-	-	-	541	150,000,000	-	-	541	150,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhiya Kebutruhan laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan Dinas	100	100	Prosen	100	103.993,700	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	543.993,700			
	06.01.		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja yang dibuat	25	9	Dok	6	50,000,000	6	52,500,000	6	52,500,000	6	52,500,000	6	52,500,000	30	290,000,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon	
	06.02.		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	10	10	Dok	10	49,993,800	10	52,500,000	10	52,500,000	10	52,500,000	10	52,500,000	50	299,993,800	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon	
	06.04.		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	Dok	1	3,999,900	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	23,999,900	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon	
	07.		Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Terpenuhiya rencana strategis dan rencana kerja Dinas	100	100	Prosen	100	53.712,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	273.712,000			
	07.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Dinas	6	2	Dok.	1	53,712,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	2	55,000,000	5	273.712,000	SEKRETARIAT DPUPR	Kabupaten Cirebon	
								<b>JUMLAH</b>	<b>886.531,050,000</b>		<b>241.889,805,101</b>		<b>270.150,000,000</b>		<b>263,315,000,000</b>		<b>301,389,500,000</b>		<b>1,943,854,355,101</b>			



## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD**

#### 7.1. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator **outcome** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (**outcome**) atau kompositnya (**impact**). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (**outcome**) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon periode tahun 2019-2024, adapun IKU daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disajikan pada tabel 7.1. Sedangkan indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disebut IKK, memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah merupakan indikator kinerja tingkat sasaran (dampak/impact) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disajikan pada tabel 7.2.



Tabel 7.1  
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024  
 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	PENANGGUNG JAWAB
				n-1 (2018)	n (2019)	n+1 (2020)	n+2 (2021)	n+3 (2022)	n+4 (2023)	n+5 (2024)		
1	MISI KABUPATEN CIREBON MAJU	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	Persen	77,36	77,99	78,73	79,46	80,20	80,93	81,67	81,67	PUPR, Kimrum

Tabel 7.2  
 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024  
 Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD						Target Capaian Setiap Tahun-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
				n-1 (2018)	n (2019)	n+1 (2020)	n+2 (2021)	n+3 (2022)	n+4 (2023)	n+5 (2024)	n+1 (2020)	n+2 (2021)	n+3 (2022)	n+4 (2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	ASPEK DAYA SAING DAERAH															
	FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR															
1	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW/ Rencana Peruntukan X 100%	%	na	na	100	100	100	100	100	100	100	100	PUPR		

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan Misi, untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 7.3. dibawah ini :

## 7.3.

## Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian setiap tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				n-1 (2018)	n (2019)	n+1 (2020)	n+2 (2021)	n+3 (2022)	n+4 (2023)	n+5 (2024)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Kondisi Infrastruktur jaringan jalan Kondisi Baik dan Meningkatkan intensitas tanam	Jumlah Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap) dan Jumlah Intensitas Tanam/2 x 100	%	166,52	167,25	168	169	170	171	172	172

## 7.2. Indikator Kinerja Utama

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal bussines (aktivitas yang utama), tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dapat terlihat pada tabel 7.3., dibawah ini :

Tabel 7.2.  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				n-1 (2018)	n (2019)	n+1 (2020)	n+2 (2021)	n+3 (2022)	n+4 (2023)	n+5 (2024)	
1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	Panjang Jalan. Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang/ Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya x 100	%	81,40	82,50	83	84	85	86	87	87
2. Terperuhnya penyediaan air Irigasi secara Optimal	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	Jumlah Kumulatif realisasi Tata Tanam	%	251,64	252	253	254	255	256	257	257
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan/ Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW X 100	%	Na	Na	0	5,56	11,11	16,67	27,78	27,78
4. Terciptanya pelayanan jasa konstruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah Realisasi Layanan Informasi/ Jumlah Layanan Informasi yang direncanakan x 100	%	Na	Na	40	55	70	85	100	100
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat	point	68	60,6	68,5	70	71,5	73	75	75

## **BAB VIII** **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 merupakan arahan penyelenggaraan dan komitmen aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dan untuk mewujudkan apa yang telah menjadi visi dan misi yang ingin dicapai oleh Dinas maka dibutuhkan adanya koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antara Pemerintah, Masyarakat dan swasta. Sehingga sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai target yang maksimal dalam hal penyediaan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mantap.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkesinambungan serta akuntabel diharapkan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berjalan secara efektif, efisien serta berhasil guna.

Dalam tahap implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 keberhasilan pencapaian visi dan misi sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, disamping sikap konsisten jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon terhadap komitmen tersebut, agar upaya penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Baik dalam rangka mendukung misi Pembangunan Daerah dapat terwujud.

Dalam tahap implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 keberhasilan pencapaian visi dan misi sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, disamping sikap konsisten jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon terhadap komitmen tersebut, agar upaya penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baik dalam rangka mendukung misi pembangunan daerah dapat terwujud.

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI**



Dalam tahap implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 keberhasilan pencapaian visi dan misi sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, disamping sikap konsisten jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon terhadap komitmen tersebut, agar upaya penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang baik dalam rangka mendukung misi pembangunan daerah dapat terwujud.

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI**